

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Sesuai dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengumumkan susunan kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Walaupun kabinet baru telah dibentuk, namun Presiden masih harus meneruskan APBN 2004 sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat memasuki tahun 2005, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 pun telah disusun oleh kabinet sebelumnya sehingga Presiden harus melaksanakan APBN 2005 sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Pada saat menjalankan APBN 2005, Presiden menghadapi beberapa masalah, sehingga Presiden beserta menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu harus merevisi APBN 2005 tersebut. Pengeluaran negara pada saat itu melambung tinggi, defisit ditaksir sebesar Rp.31,2 Triliun atau sebesar 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat itu mencapai Rp.1.989 Triliun. Padahal dalam APBN 2005 telah ditetapkan bahwa target defisit adalah 1,3%, yang berarti telah terjadi pembengkakan defisit sebesar 0,3% atau Rp.5,5 Triliun dibandingkan

dengan target awal Pembengkakan defisit APBN 2005 diawal tahun tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM, yang menyebabkan pemerintah meningkatkan subsidi terhadap BBM. Peningkatan subsidi BBM terimbas oleh kenaikan harga minyak internasional. (www.indonesia-1.com yaitu situs mengenai para pemimpin negara)

Oleh karena itu pemerintah mengajukan APBN-Perubahan (APBN-P) pada Maret 2005 dengan asumsi harga minyak US\$35 per barel, kurs Rp.8.900 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,5% dan inflasi sebesar 7%. Pada saat itu harga BBM meningkat 22,2-39,4% dari harga sebelumnya, yaitu Premium naik menjadi Rp.2.400 dari Rp.1.810 per liter, solar untuk transportasi naik dari Rp.1.650 menjadi Rp.2.100 per liter, dan solar untuk industri naik dari Rp 1.650 menjadi Rp 4.200 per liter. Satu-satunya jenis BBM yang tidak akan dinaikkan harganya adalah minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga, yakni tetap Rp 700 per liter. Sedangkan minyak tanah untuk industri naik dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.200 per liter. Minyak diesel dan minyak bakar naik dari Rp 1.650 per liter menjadi Rp 2.300 (www.bi.go.id yaitu situs Bank Indonesia).

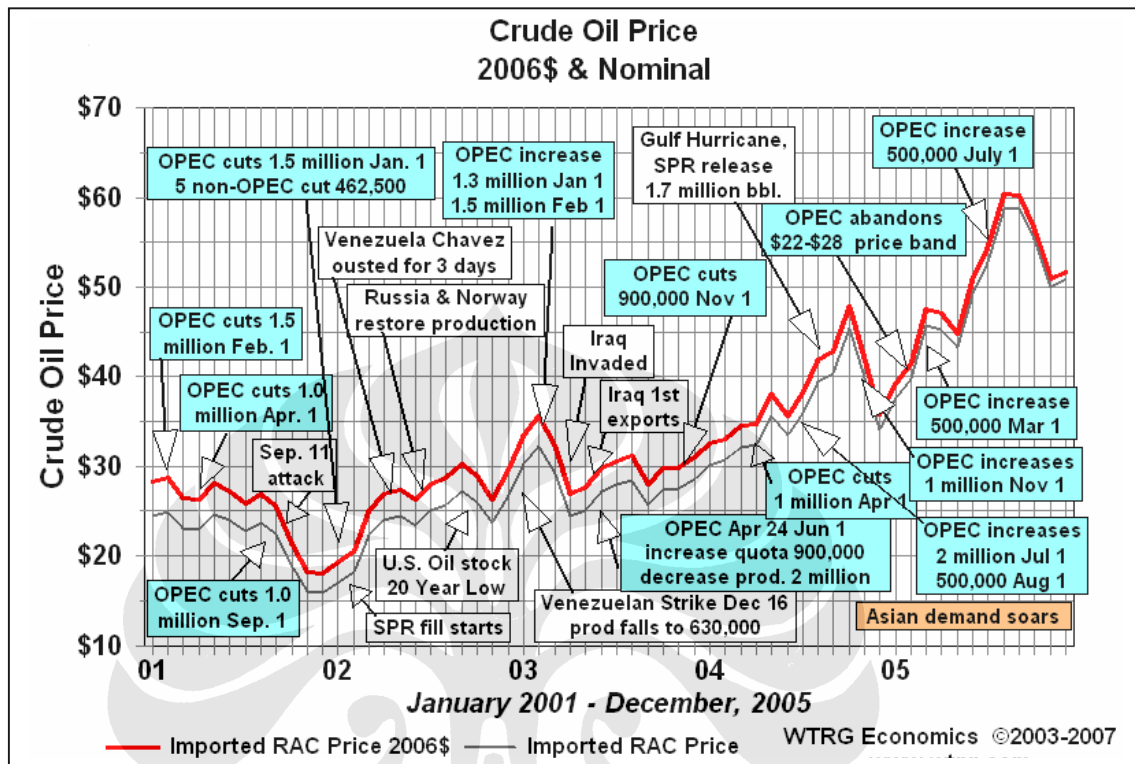
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, bahwa asumsi harga minyak sebesar US\$35 per barel yang diajukan kepada DPR masih jauh dari realitas. Dengan harga minyak dunia di atas US\$50 per barel, dan harga jual minyak Indonesia di pasar dunia kisaran US\$45 hingga US\$50 per barel, ternyata masih tetap jauh di atas asumsi usulan APBN-P yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Harga minyak mentah dunia terus meningkat, pada sesi penutupan lelang di London pada April 2005, harga minyak “light-sweet” yang menjadi patokan dunia mencapai US\$56,99 per barel. Apabila dibandingkan dengan awal tahun 2002, harga minyak dunia telah meningkat dua kali lipat. Imbas perkembangan harga minyak dunia

terhadap kondisi harga BBM dalam negeri sangat besar. Pemerintah terpaksa memberikan subsidi BBM lebih besar kepada masyarakat, bila tidak ingin harga BBM naik terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah subsidi BBM meningkat kembali secara pesat, setelah pada tahun 2002 dan 2003 menurun. Pada APBN 2004 ditargetkan perkiraan awal jumlah subsidi sebesar Rp.14,5 triliun, dengan asumsi harga minyak US\$22 per barel dan kurs Rp.8.600 per dolar AS, kemudian jumlah subsidi diubah pada APBN-P 2004 yang disetujui DPR pada September 2004 menjadi sekitar Rp.59 Triliun, dengan asumsi harga minyak US\$36 per barel dan kurs Rp.8.900 per dolar AS. Sementara itu, saat menyampaikan laporan ekonomi akhir 2004, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan bahwa walaupun subsidi BBM kian hari kian meningkat, APBN 2004 relatif dapat terjaga meskipun tekanan yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia dirasakan sangat kuat. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit APBN 2004 dalam ruang yang aman memungkinkan beban dan risiko fiskal makin membaik. “Namun dalam realisasi, subsidi sampai dengan akhir tahun 2004 adalah Rp.69 Triliun, karena harga minyak telah mencapai US\$37,17 per barel dan kurs Rp.8.939 per dolar AS Pada awal tahun 2005 harga minyak dunia mencapai di atas US\$55 per barel dan kurs Rupiah rata-rata di atas Rp.8.900 per dolar AS, sehingga pada APBN 2005 subsidi BBM meningkat menjadi di atas Rp.70 Triliun,” kata Menko Perekonomian. (www.perbendaharaan.go.id yaitu situs Direktorat Jendral Perbendaharaan oleh Departemen Keuangan)

Berdasarkan data dari WTRG yaitu Pusat Data dan Analisa untuk Produsen dan Konsumen Energi di Amerika Serikat, berikut adalah grafik I-1.perkembangan harga minyak mentah dunia sejak tahun 2001 sampai 2005.

Grafik I-1.

Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia Sejak Tahun 2001-2005



Sumber : www.wtrg.com yaitu situs Pusat Data dan Analisa untuk Produsen dan Konsumen Energi

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan yang tinggi setiap tahun, hal ini disebabkan oleh OPEC mengurangi produksinya, kemudian Amerika Serikat juga mengurangi ekspor minyak mentahnya dan selain itu adanya permintaan minyak mentah yang semakin meningkat di Asia.

Dalam penyusunan APBN, subsidi BBM termasuk bagian dari Belanja Pemerintah Pusat. Subsidi BBM diberikan dalam bentuk subsidi premium, subsidi solar dan subsidi minyak tanah. Subsidi premium terutama dinikmati oleh para pemilik kendaraan bermotor (seperti mobil dan sepeda motor), masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor diperkirakan sekitar 82% dari pengguna BBM. Subsidi solar terutama diterima oleh angkutan umum (seperti bus

dan truk) serta industri, sedangkan subsidi minyak tanah terutama dinikmati oleh rumah tangga untuk memasak yang sebagian besar masyarakat golongan miskin.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa subsidi BBM lebih banyak diterima oleh kalangan yang seharusnya bukan sasaran subsidi. Seharusnya subsidi diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dan bukan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke atas saja.

Untuk menghindari APBN yang membengkak disisi pengeluaran, pemerintah tidak akan meningkatkan subsidiya. Pemerintah melakukan reformasi BBM yang sekaligus juga bertujuan agar subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah akan menaikkan harga BBM khususnya jenis Pertamina dan Pertamina Plus yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas sesuai harga keekonomiannya, namun pemerintah akan menetapkan harga dan memberi subsidi untuk BBM yang di konsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah seperti BBM jenis premium, minyak tanah dan solar. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya bagi 36,1 juta rakyat golongan miskin di Indonesia.

Dampak negatif dari kebijakan subsidi BBM adalah adanya disparitas harga yang sangat besar antara :

- Harga BBM dalam negeri dan luar negeri sehingga menimbulkan kemungkinan penyelundupan ke luar negeri, apalagi jika pengawasan perdagangan BBM antar-pulau yang relatif lemah

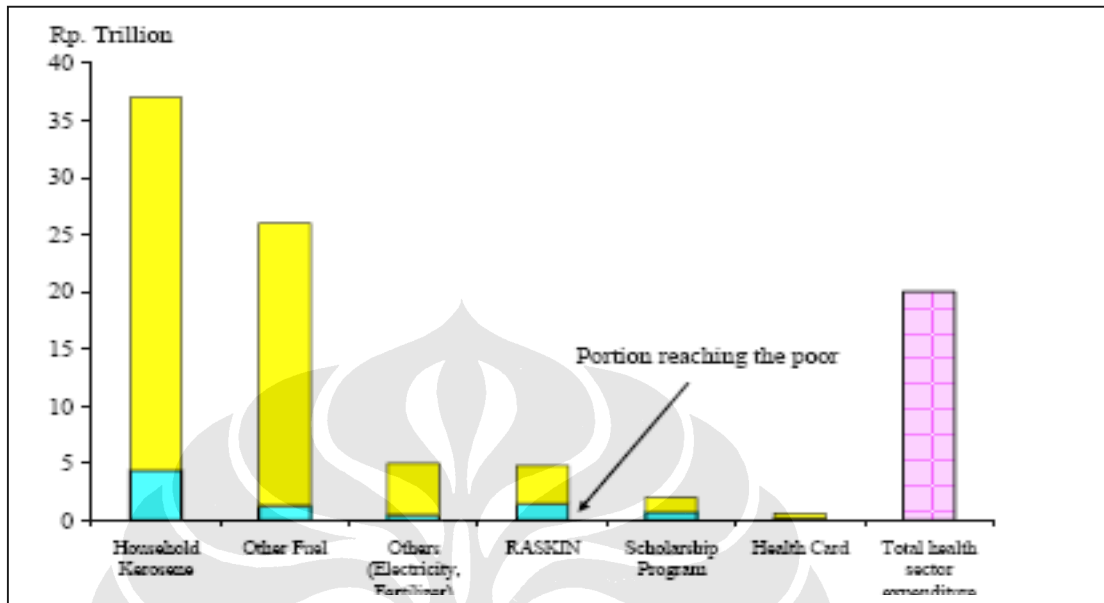
- Harga minyak tanah dan harga solar, sehingga menyebabkan terjadinya pengoplosan dalam solar yang dijual kepada transportasi atau industri dan menyebabkan kemungkinan kerugian dalam peralatan atau angkutan yang cepat rusak
- Harga minyak tanah atau solar untuk rumah tangga dan industri, sehingga terjadi kekurangan pasokan bagi masyarakat pengguna minyak tanah rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam pembelian minyak tanah dan memicu gejolak sosial dalam masyarakat.

Di pihak lain, jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan subsidi BBM, berarti pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM dengan dampak yang akan timbul, yaitu peningkatan inflasi. Pemerintah telah memperhitungkan kemungkinan menaikkan harga BBM dengan terjadinya inflasi dalam batas-batas yang masih dapat dikelola. Sebenarnya jika pemerintah menaikkan harga BBM akan diperoleh penghematan dari subsidi BBM tersebut yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan program-program penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan perumahan rakyat dan pelayanan sosial.

Berdasarkan data dari Departemen Pekerjaan Umum, subsidi BBM di Indonesia sebagian besar dinikmati oleh masyarakat golongan atas daripada golongan miskin dan pada grafik I-2. dijelaskan perbandingan subsidi BBM terhadap komponen lain dalam APBN yang tidak kalah penting bagi kesejahteraan masyarakat dan perbandingannya.

Grafik I-2.

Perbandingan Subsidi BBM terhadap Komponen Lain dalam APBN



Sumber : www.pu.go.id yaitu situs Departemen Pekerjaan Umum

Dalam grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 subsidi minyak tanah sangat tinggi yang mencapai lebih dari Rp.35 Trilliun dan Rp.30 Trilliun dinikmati oleh masyarakat golongan atas dan hanya Rp.5 Trilliun yang dinikmati oleh masyarakat golongan bawah. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan subsidi bagi kebutuhan lain seperti RASKIN (Beras Miskin), pendidikan serta kesehatan, masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus menurunkan subsidi BBM dan mengalokasikannya pada kebutuhan yang lain yang lebih penting dan dapat dinikmati oleh masyarakat golongan miskin.

Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah kembali menaikkan harga akibat BBM akibat kenaikan harga minyak dunia yang sangat tinggi, seperti pada tabel I-1. dibawah ini :

Tabel I-1.

Kenaikan Harga BBM 1 Oktober 2005

B B M	Harga Baru/liter (Rp)	Harga lama/liter (Rp)	Keterangan
P r e m i u m	4.500	2.400	Naik 87,5%
M i n y a k T a n a h	2.000	700 - Rumah Tangga	Naik 185,7%
		2.200 - Industri	Turun 10%
S o l a r	4.300	2.100 - Non Industri	Naik 104,8%
		4.200 - Industri	Naik 2,4%

Sumber : www.kompas-cetak.com yaitu situs Surat Kabar Kompas

Pemerintah menaikkan harga minyak tanah menjadi Rp.2.000 per liter atau 185,7% dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp.700 per liter. Harga minyak solar ditetapkan Rp.4.300 per liter atau 104,8% lebih tinggi dari harga sebelumnya Rp.2.100 per liter. Sementara harga premium menjadi Rp.4.500 per liter atau naik 87,5% dari harga sebelumnya Rp. 2.400 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005.

Saat mengumumkan keputusan tersebut di Jakarta, Jumat, 30 September 2005, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan bahwa dasar pemerintah dalam memutuskan harga baru itu adalah untuk meringankan beban keuangan negara yang semakin berat dalam penyediaan BBM dalam negeri. Aburizal Bakrie menambahkan bahwa, harga minyak tanah itu diperuntukkan bagi rumah tangga serta usaha kecil, dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara harga jual eceran premium dan solar diperuntukkan bagi transportasi darat, termasuk sungai, danau, dan penyeberangan, serta kendaraan pribadi. Harga tersebut sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Walaupun pemerintah telah menaikkan harga BBM, pada tanggal 1 Oktober 2005 tersebut, berdasarkan keterangan dari Departemen Pekerjaan Umum, ternyata harga BBM di Indonesia merupakan harga terendah di ASEAN dan berkisar dibawah harga minyak internasional. Hal ini terjadi karena pemerintah masih mensubsidi harga BBM dalam negeri dengan jumlah yang sangat besar, sehingga rakyat Indonesia dapat mengkonsumsi BBM dengan harga terjangkau.

BBM merupakan urat nadi aktivitas masyarakat, sehingga kenaikan harga BBM tentu saja akan menaikkan harga barang dan jasa lainnya, terutama harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum/taksi. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyadi, pada harian Kompas 24 November 2005 menyatakan bahwa kenaikan harga BBM juga memberi dampak cukup berarti pada beban petani yang semakin tinggi dan bahkan mengancam UKM gulung tikar. Dampak yang paling berat adalah gizi anak usia prasekolah dan dunia pendidikan yang diprediksi akan menaikkan lagi angka putus sekolah yang sebelumnya sudah mengalami peningkatan pada tahun 2004.

Harga BBM di Indonesia jika dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN sangatlah rendah. Harga BBM dalam negeri yang seharusnya meningkat sejak tahun 1990-an karena kenaikan harga minyak dunia telah dihindari oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan karenanya pemerintah ingin tetap melindungi masyarakatnya dengan terus memberikan subsidi BBM. Harga minyak internasional yang semakin tinggi, dan pemerintah yang terus menerus meningkatkan subsidi BBM nya, tentu saja membuat

pemerintah terbebani, karena pengeluaran dalam APBN yang semakin meningkat. Saat pengeluaran dalam APBN yang semakin membengkak, pemerintah seharusnya meningkatkan harga BBM, namun masyarakat yang telah terbiasa menikmati harga BBM yang rendah, tidak siap menghadapi kenaikan BBM. Pengurangan subsidi baru dilakukan pada pertengahan tahun 1993 dengan meningkatkan harga BBM. Pada saat itu sewaktu harga BBM meningkat, rakyat belum siap menanggung kenaikan harga BBM tersebut. Barulah pada krisis ekonomi pada tahun 1998 melanda Indonesia, Pemerintah terpaksa meningkatkan harga BBM di dalam negeri (www.migas-indonesia.com yaitu situs mengenai produksi dan konsumsi minyak dan gas).

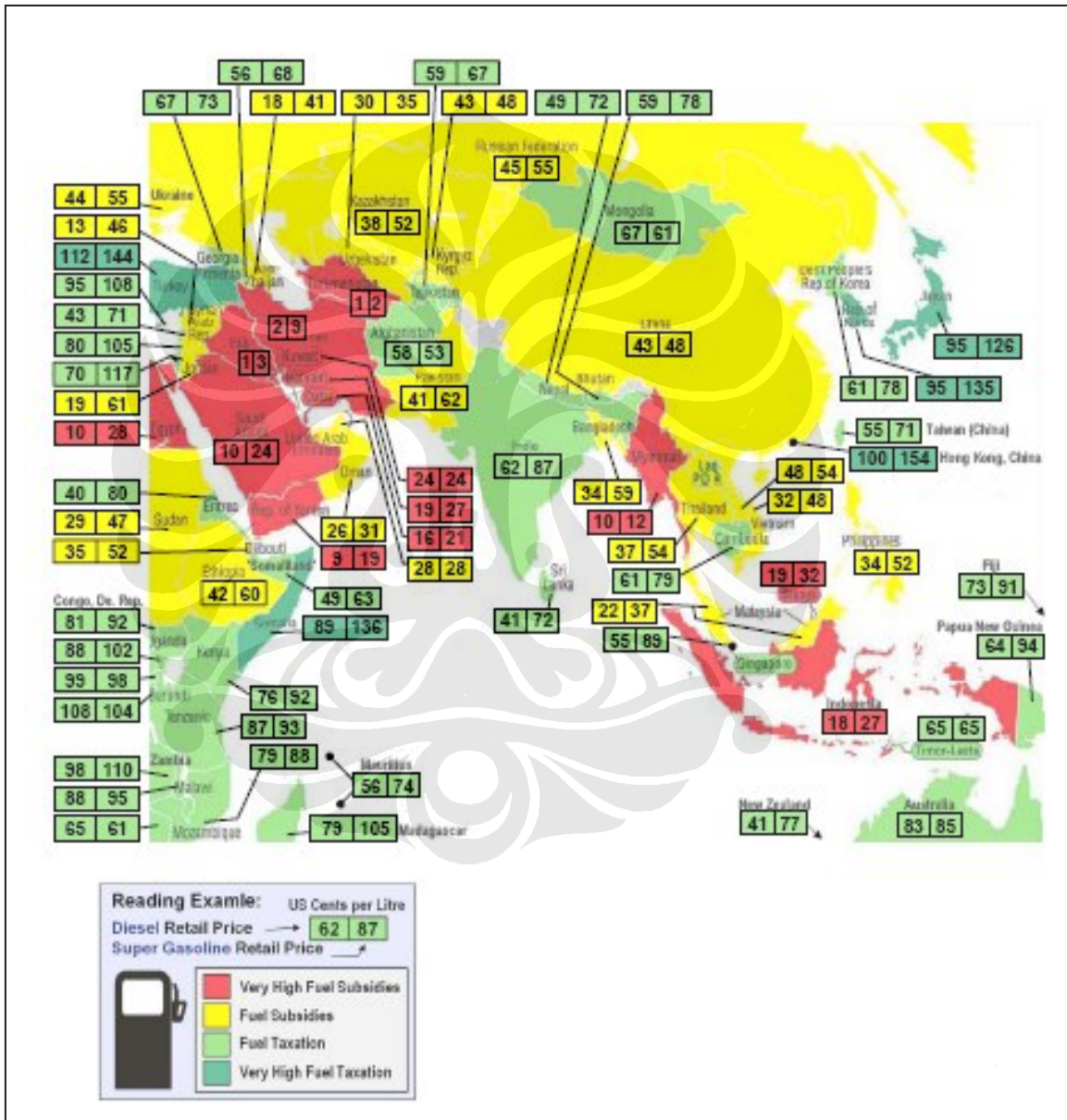
Disaat ekonomi kian membaik pasca krisis tahun 1998, dan mengingat jumlah subsidi BBM yang semakin besar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) pemerintah akan melaksanakan program restrukturisasi di sektor migas dengan mengurangi subsidi BBM secara bertahap dengan target tidak ada subsidi BBM lagi pada tahun 2003. (www.kompas-cetak.com)

Departemen ESDM pada tahun 2004 telah memperkirakan bahwa harga minyak dunia pada akhir dekade ini akan mencapai US\$100 bahkan dapat menembus angka US\$200 per barrel, perkiraan ini dibuat karena kondisi geopolitik yang memanas, antara hubungan Irak dan Turki serta turunnya cadangan minyak Amerika Serikat, yang memberikan tekanan kenaikan harga minyak dunia. Bila di masa depan pemerintah tidak meningkatkan harga BBM, akan membawa konsekuensi peningkatan subsidi BBM yang sangat besar. Gambar I-1. dibawah ini menjelaskan tentang penerapan kebijakan subsidi BBM di berbagai negara di Asia dan Timur

Tengah, dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan harga BBM yang sangat rendah dengan subsidi BBM yang sangat besar oleh pemerintah.

Gambar I-1.

Penerapan Subsidi BBM di Berbagai Negara di Asia dan Timur Tengah



Sumber : www.international-fuel-prices.com yaitu situs mengenai harga retail BBM dari Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia dan Eropa yang dipublikasi oleh World Bank

Pemerintah bukan hanya dihadapkan oleh rumitnya merancang pembangunan dan menyusun RAPBN, tetapi juga dengan menentukan besarnya subsidi terutama BBM yang harus ditanggung setiap tahun. Karena itulah, pemerintah bersama DPR telah membuat keputusan untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap terkecuali subsidi minyak tanah seperti tertuang dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Pemerintah akan menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, dan masih mensubsidi minyak tanah, karena minyak tanah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Minyak tanah digunakan untuk memasak dan untuk penerangan. Sehingga harga komoditi ini harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia yang masih terbatas. Oleh karena itu pemerintah akan terus memberikan subsidi minyak tanah yang digunakan oleh rumah tangga agar tetap terjangkau oleh masyarakat

Walaupun pada tahun 2005, harga minyak tanah meningkat 185,7% dari harga Rp.700 per liter menjadi Rp.2000 per liter, namun subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir ini, sangat memberatkan karena selain sulitnya menetapkan besarnya volume yang harus disubsidi, juga diiringi dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam sistem manajemen energi nasional. Situasi ini semakin berat dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran US\$60 per barrel pada akhir tahun 2005. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan reformasi BBM, yaitu :

1. Konversi penggunaan energi solar menjadi energi batubara oleh PLN, yaitu PLTU batubara.
2. Menetapkan harga bahan bakar yaitu Premium dan Pertamina sesuai dengan harga pasar minyak dunia.

3. Mengkonversi bahan bakar minyak tanah untuk rumah tangga menjadi bahan bakar gas dalam bentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Reformasi BBM tersebut dipandang sebagai cara yang tepat dalam mengatasi masalah penghematan energi, pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.

I.2. Perumusan Masalah

Situasi keuangan negara dengan subsidi BBM yang sedemikian besar menjadi beban berat bagi APBN. Pengurangan subsidi BBM harus dilakukan, namun subsidi bagi minyak tanah sulit sekali dihindarkan, karena minyak tanah sangat dibutuhkan bagi rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan reformasi BBM, salah satunya adalah konversi minyak tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG). Dengan adanya konversi minyak tanah ke LPG, diharapkan jumlah konsumsi minyak tanah akan menurun, sehingga pengurangan subsidi minyak tanah dapat dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, maka penelitian ini akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini :

- 1) Variabel-variabel ekonomi apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi minyak tanah?
- 2) Apakah konversi minyak tanah ke LPG merupakan kebijakan yang tepat dalam mengurangi konsumsi minyak tanah?
- 3) Apakah konversi minyak tanah ke LPG dapat memenuhi target pemerintah dalam penghematan APBN?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui variabel ekonomi apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi minyak tanah.
- 2) Mengetahui apakah konversi minyak tanah ke LPG adalah kebijakan yang tepat dan signifikan dalam mengurangi konsumsi minyak tanah.
- 3) Mengetahui apakah konversi minyak tanah ke LPG dapat memenuhi target pemerintah dalam penghematan APBN.

I.4. Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui jumlah konsumsi minyak tanah, dalam teori ekonomi mikro, dijelaskan bahwa permintaan dipengaruhi oleh 3 hal penting, yaitu harga barang tersebut, harga barang substitusi dan tingkat pendapatan masyarakat.

Permintaan terhadap harga minyak tanah bersifat inelastis, karena minyak tanah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, sehingga jika terjadi perubahan harga akibat kelangkaan, perubahan jumlah permintaan minyak tanah tidak langsung terjadi. Selain itu, jika terjadi konversi kepada energi lain seperti minyak tanah ke LPG, diperlukan waktu untuk mempersiapkan kelangsungan proses konversi tersebut dengan matang serta waktu penyesuaian yang panjang, walau harga sumber daya lain sebagai konversi tersebut lebih murah.

Berdasarkan teori permintaan tersebut, hipotesa awal dalam penelitian ini adalah :

$$K_t = K_t (P_{Kt}, P_{LPG}, P_E, Y, K_{t-1}, DUMMYLOC)$$

Dimana :

K_t = Permintaan minyak tanah (kerosene) pada waktu t

P_{Kt} = Harga minyak tanah (kerosene) dalam rupiah per liter

P_{LPG} = Harga LPG (gas) dalam rupiah per kg

P_E = Harga listrik (electricity) dalam rupiah per kWh

Y = Pendapatan per kapita dalam juta rupiah

K_{t-1} = Permintaan minyak tanah pada waktu t-1 dalam rupiah

DUMMYLOC= Dummy variable

Permintaan minyak tanah di Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak tanah itu sendiri dan harga barang substitusi minyak tanah yaitu harga LPG untuk memasak dan listrik untuk penerangan. Selain itu permintaan minyak tanah dipengaruhi oleh pendapatan dalam suatu rumah tangga serta kemajuan ekonomi masyarakat.

Indikator untuk mengukur kemajuan teknologi suatu daerah adalah dapat didekati dengan melihat permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (time lag 1 tahun). Variabel dummy location (DUMMYLOC), ditujukan untuk membedakan bahwa propinsi tersebut merupakan propinsi yang kaya atau miskin. Pendapatan per kapita dengan batasan nilai Rp.7.200.000 dalam 1 tahun yang merupakan nilai rata-rata PDRB per kapita Indonesia tahun 2004, ditentukan dummy = 1 yaitu propinsi dengan PDRB per capita diatas Rp.7.200.000 dalam 1 tahun dan dummy = 0 propinsi dengan PDRB per capita dibawah Rp.7.200.000 dalam 1 tahun.

I.5. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metodologi penelitian yang akan digunakan terdiri dari studi literatur, pengolahan data sekunder dan juga analisa pada hasil penelitian. Data yang akan digunakan merupakan data *cross section*, tahun 2004 yang merupakan tahun sebelum konversi minyak tanah ke LPG dan data 30 propinsi di Indonesia. Sumber data diperoleh dari BP Migas, Badan Pusat Statistik, Nota Keuangan oleh Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, serta CEIC yaitu pusat data makroekonomi, industri dan keuangan Asia.

Analisa yang dilakukan akan menggunakan metode *OLS* atau *Ordinary Least Square regression* dengan menggunakan software STATA. Metode ini harus memenuhi asumsi statistik sehingga diperlukan pengujian pelanggaran asumsi statistik yang meliputi uji heteroskedasitas, multikolinearitas dan autokorelasi.

I.6. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjawab variabel ekonomi apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan minyak tanah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab apakah konversi minyak tanah ke LPG berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan minyak tanah. Pada akhirnya dengan terjawabnya pertanyaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi para peneliti dan pembuat kebijakan mengenai konversi minyak tanah ke LPG. Beberapa masalah yang muncul dengan adanya konversi minyak tanah ke LPG dapat teratasi dan juga dapat memperbaiki implementasi kebijakan tersebut pada masa depan.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, signifikansi penelitian, serta pokok pembahasan dari setiap bab.

BAB II Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur menguraikan beberapa kerangka teori yang mendasari penelitian ini. Secara garis besar, teori-teori tersebut adalah Teori Permintaan umum yang diajarkan pada ilmu ekonomi mikro dan lebih spesifik lagi adalah teori permintaan minyak tanah. Selain itu terdapat teori Analisa Kebijakan Publik dan Ekonomi Keuangan Negara.

BAB III Implementasi Kebijakan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi APBN negara secara umum dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, yang mendasari terjadinya konversi minyak tanah ke LPG. Sebab, akibat serta dampak dan pengaruh dari konversi minyak tanah ke LPG juga akan dipaparkan pada bab ini.

BAB IV Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai model dan metode penelitian yang digunakan.

BAB V Hasil Pengujian dan Analisis

Pada bab ini diuraikan hasil pengujian secara empiris yang telah dilakukan dan analisa berdasarkan model yang digunakan untuk dapat melihat kesesuaian antara hipotesis awal dengan hasil penelitian.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan studi dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan.

Terakhir merupakan bibliografi yang berisi daftar bacaan yang penulis gunakan sebagai sumber referensi dalam penulisan penelitian ini dan juga akan dilampirkan beberapa hasil pengujian ekonometri yang digunakan dalam penelitian ini.

